

# DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Abdul Bashir**  
**abd.bashir@gmail.com**

## **Abstract**

*This research attempts to determine the impact of fiscal decentralization on regional economic indicators such as economic growth, inequality of income per capita, the number of poor, human development index and the absorption of labor and to determine the condition of inter-regional economic performance in South Sumatra province. This research uses the concept of the degree of fiscal decentralization approach in terms of revenue and expenditure as well as regional economic indicators with the calculation of economic growth and income inequality, and the percentage of poor population, human development index and the absorption of labor that was obtained from Badan Pusat Statistik (BPS). The analytical tools used in this study include: the degree of fiscal decentralization, the inequality index, the index of economic performance, and the simple regression. The data used is secondary data based on calculations by the relevant institutions. The calculation result shows that the degree of fiscal decentralization in most areas is still relatively low. The index shows the inequality of income inequality between regions is still very unequal. Economic performance index shows the economic performance of most areas is still very low because of the regional divisions. Regression results indicate there is a negative correlation between fiscal decentralization and economic growth, while between fiscal decentralization and income inequality has a positive correlation, further fiscal decentralization has a negative correlation to the number of poor people, then between fiscal decentralization on human development index has a positive correlation, and for absorption labor positively correlated. The result of these calculations show that in general the implementation of fiscal policy for 15 regencies/cities in the South Sumatra province are not running optimally and effectively.*

*Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Inequality, Poverty Population, Human Development Index, and Labor Absorption*

## **PENDAHULUAN**

Desentralisasi Fiskal di Indonesia berkaitan dengan adanya keputusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik daripada kebijakan dahulu yang tersentralisasi melalui Undang-Undang No. 5 sejak tahun 1974. konsep desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi serta dapat

mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara vertikal maupun horizontal kepada ke 33 propinsi di Indonesia (Simanjuntak, 2005 : 23).

Pada pelaksanaannya, desentralisasi menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk menggunakan optimalitas sumber-sumber pendapatan asli daerahnya seperti pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih baik. Namun, Indonesia sebagai negara yang kaya akan pulau memiliki sumber daya alam (SDA) yang tidak merata. Ada daerah yang kaya dengan SDA tetapi ada juga daerah yang miskin SDA. Hal ini disebabkan oleh perbedaan *factor endowment* seperti letak geografis dan perbedaan karakteristik sumber daya manusianya (Ehtisham, 2002: 212).

Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat hakekat otonomi yang merupakan adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003; 34). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era desentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002; 57).

Secara ekonomi Sumatera Selatan diuntungkan karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menyebabkan kemampuan perekonomian Sumatera Selatan untuk melakukan ekspor hasil produksinya keluar daerah/luar negeri. Berdasarkan data BPS nilai ekspor Sumatera Selatan Tahun 2010 hingga bulan Februari 2010 tercatat sebesar US\$ 352,44 juta atau mengalami peningkatan sebesar sebesar 32,27 % dibandingkan pada periode yang sama Tahun 2009. Sementara itu pada periode yang sama nilai impor Sumatera Selatan sebesar US\$ 29,3 juta. Dengan demikian neraca perdagangan Sumatera Selatan mengalami surplus sebesar US\$ 323,14 juta, namun masih banyak ekspor barang tambang

dan perkebunan yang nilai tambahnya tidak besar dikarenakan ekspor baru sebatas bahan mentah.

Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*Block Grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 33 Tahun 2004 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat (Machfud, 2002:13). Pada dasarnya daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi. Pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi modal dasar yang kuat untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal.

Menyimak berbagai pandangan positif tentang manfaat desentralisasi, dapatlah dikatakan bahwa penjabaran dari pelaksanaan desentralisasi fiskal bisa membuat perekonomian suatu daerah lebih maju, yang diindikasikan dengan naiknya penerimaan daerah, pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita. Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas masyarakat direfleksikan melalui indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat pengangguran dalam perekonomian nasional dapat terealisasi dengan lebih baik melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal (Vazques and Robert, 2001: 186).

Berdasarkan uraian beberapa indikator perekonomian daerah tersebut, maka paradigma indikator perekonomian di Provinsi Sumatera selatan akan diukur. Selanjutnya melihat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin dan jumlah angkatan kerja. Hal tersebut berkaitan dengan padatnya konsentrasi pengalokasian penerimaan daerah untuk perencanaan pengeluaran melalui APBD. Berdasarkan uraian di atas peneliti

tertarik untuk mengukur dan menganalisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
- (2) Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
- (3) Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
- (4) Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
- (5) Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
- (6) Bagaimana kinerja perekonomian antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan setelah desentralisasi fiskal?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Konsep Desentralisasi Fiskal***

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan desember 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Menurut Ebel dan Yilmaz (2002: 245) ada tiga variasi desentralisasi, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

- (1) *Deconcentration* merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.
- (2) *Delegation* merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat

- (3) *Devolution* merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (*Devolution*). Lebih lanjut Slinko (2002 : 214) menyatakan bahwa:

*Under the concept of "fiscal decentralization" we understand the assignment of fiscal responsibilities to the lower levels of government, that is, the degree of regional (local) autonomy and the authority of local government to decide upon its own expenditure and its ability to generate local revenues.*

Pernyataan Slinko (2002:201) mempertegas pengertian desentralisasi fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Tujuan penerapan adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) dalam kondisi tersebut (Machfud, 2002:18 ).

### ***Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional***

Untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah atau suatu propinsi biasanya digunakan indikator-indikator makroekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Tarigan, 2004 : 82). Dalam konteks analisis input-output regional dan tampilan struktur ekonomi daerah dalam tabel input-output regional, maka beberapa pengertian yang dianggap layak untuk dibahas dalam rangka menganalisis kinerja perekonomian suatu daerah atau propinsi adalah : (1) pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah atau regional, (2) pendapatan daerah berupa produk domestik regional bruto (PDRB), dan (3) distribusi pendapatan atau pendapatan perkapita.

Pengertian pertumbuhan ekonomi pada dasarnya terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan. Berbeda dengan pembangunan ekonomi,

yang mengandung arti lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

### ***Konsep Kemiskinan***

Konsep kemiskinan secara umum, menurut Badan Pusat Statistik tipe dan faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan dijelaskan beberapa indikator yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat kemiskinan, kemiskinan menyangkut konsep yang multidimensional dalam penelitian ini kemiskinan dibatasi pada konsep yang berhubungan dengan faktor ekonomi dan kriteria yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah kriteria yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Sajogyo (1996 : 23) garis kemiskinan mempunyai ciri-ciri : (1) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi "nilai ambang kecukupan pangan" (*food threshold*), dan (2) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein). Garis kemiskinan ciri pertama dinyatakan dalam Rp /bulan, dalam bentuk equivalen nilai tukar beras (kg/orang/bulan) agar dapat saling dibandingkan nilai tukar antar daerah dan antar zaman.

Indikator yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah tingkat kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan, pendekatan di dalam mengukur tingkat kemiskinan tersebut yaitu (1) *headcount measure*, yaitu memperkirakan jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan, dan (2) *poverty gap* adalah memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ukuran lain yang digunakan untuk melihat tingkat garis kemiskinan yang ada di tingkat masyarakat adalah dengan melihat pengeluaran dan penerimaan per kapita yang akan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.

### **PENELITIAN TERDAHULU**

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan terhadap penelitian dengan topik dampak desentralisasi fiskal dan perekonomian daerah. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu lingkup kajian agregat nasional, sedangkan pada penelitian yang sedang

dilakukan lingkup kajian agregat regional pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan refleksi dari implementasi dan efek dari desentralisasi fiskal terhadap perekonomian lebih difokuskan pada indikator perekonomian daerah.

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai kebebasan berinovasi dan berkreasi dari pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi *inisiator*, *fasilitator* dan *regulator* dalam mengoptimalkan perannya pada lingkup payung UU No 32 dan UU No 33 Tahun 2004 dalam mengelola anggaran pemerintah belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (IPM), dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerahnya.

Secara agregat dampak desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui penelitian Azwardi (2007: 7) yang berjudul *The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance In Indonesia* menyatakan bahwa pengganda pengeluaran pembangunan dan pengganda pengeluaran rutin menyebabkan penerimaan daerah yang meningkat. Jika dilihat di Pulau Jawa dan antardaerah yang memiliki dampak lebih besar yaitu dari luar Pulau Jawa. Kemudian hasil skenario simulasi, penurunan pengeluaran pada saat ini menyebabkan penurunan kinerja ekonomi antardaerah.

Sementara itu menurut Susetyo (2010 : 31) dalam kajiannya mengenai Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional menyatakan bahwa desentralisasi fiskal belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kesenjangan fiskal kabupaten/kota, karena masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mengurangi disparitas regional, tapi ketergantungan fiskal hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan masuk dalam kategori masih sangat kurang.

Penelitian Carlos, et al (1996 : 22) dengan judul *Decentralisation and Regional Economic Disparities* menyatakan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah menerima perhatian dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara desentralisasi, terutama desentralisasi fiskal, dan kesenjangan regional.

Sejalan dengan itu, penelitian Priyo Hari (2005 : 19) mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan lebih baik daripada sebelum pelaksanaan. Hasil lain menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sebelum desentralisasi fiskal masih lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hasil penelitian Rao (2000: 75) berjudul tentang *Poverty Alleviation under Fiscal Decentralization in Transitional Economy The Case of Vietnam* menemukan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh dan efektif dalam mengurangi kemiskinan karena terjadi efisiensi dalam identifikasi kemiskinan dan mampu merumuskan strategi pengurangan kemiskinan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi daerahnya.

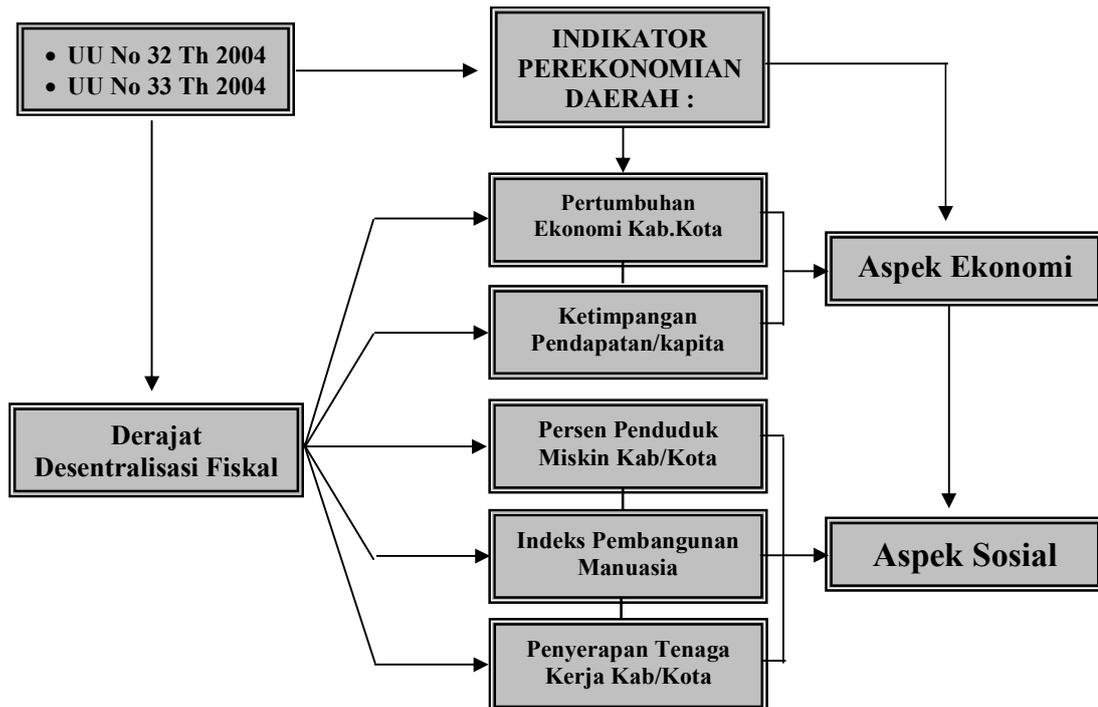
Secara spesifik Bonet (2006: 689) meneliti tentang *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From The Colombian Experience* menyatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal diperkirakan lebih objektif dibandingkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan variasi budaya, sejarah, dan kelembagaan. Akhirnya, keterbatasan lain yang diamati dalam karya sebelumnya, seperti tidak adanya ketergantungan spasial dan kepekaan kesimpulan atas upaya desentralisasi fiskal yang digunakan.

Secara luas dari sisi pengalokasian pengeluaran Vazques and Robert (2001: 243) mengkaji tentang *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Vietnam* menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh pada efisiensi alokatif dan efisiensi produksi karena pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat sehingga akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pikir mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini digunakan derajat desentralisasi fiskal yang direfleksikan melalui *rasio* penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak dan

bukan pajak dengan total pengeluaran daerah dan indikator perekonomian daerah direfleksikan melalui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan per kapita, persentase jumlah penduduk miskin, tingkat kualitas manusia yang direfleksikan oleh indeks pembangunan manusia, dan persentase penyerapan tenaga kerja. Alasannya keenam indikator ini dianggap mampu merefleksikan keadaan ekonomi di suatu daerah yang selaras dengan pembangunan manusianya.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Tujuan utama desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong kemandirian suatu daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah antara lain meningkatkan potensi sumber daya suatu daerah dalam rangka menstimulus kemampuan fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan perkapita yang merata, mengurangi kemiskinan, kualitas masyarakat agar menjadi lebih meningkat dan tingkat pengangguran berkurang, dengan demikian pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

Desentralisasi fiskal memberi peranan yang cukup penting terhadap fungsi dan wewenang pemerintah. Dalam implementasi desentralisasi fiskal, peranan

pemerintah daerah dalam melakukan upaya fiskal dengan menggali potensi fiskal sebagai sumber penerimaan daerah dan peranan pemerintah dalam membelanjakan fasilitas publik akan sangat mempengaruhi indikator perekonomian daerah seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan perkapita yang merata, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas manusia (IPM) dan penyerapan tenaga kerja. Peranan pemerintah harus dioptimalkan supaya dalam melakukan intervensi dengan biaya sosial tertentu akan memberi dampak yang maksimal terhadap indikator perekonomian daerah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian meliputi 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan termasuk daerah terbesar dan kaya sumber daya alam serta tingkat ekonomi daerah masih relatif tinggi setelah desentralisasi fiskal.

Sumber data dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan tahun pengamatan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dengan variabel indikator desentralisasi fiskal dan indikator perekonomian daerah. Selanjutnya data *times series* dikombinasikan dengan *cross section* atau lebih dikenal *pooled data/data panel*). Periode tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan mulainya pemekaran daerah di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan ketersediaan data.

Pada penelitian ini, data dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, untuk beberapa daerah kabupaten/kota yang belum ada datanya di karenakan daerah tersebut baru melakukan pemekaran/pemisahan dari daerah induk atau kontrol, data tersebut di estimasi dengan menggunakan pendekatan ekstrapolasi data yaitu dengan pertumbuhan geometri (rata-rata geometri).

Data mengenai PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, persentase keimiskinan, dan tenaga kerja bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan data fiskal daerah bersumber dari Kementerian Keuangan yakni Dirjen Perimbangan Keuangan. Sementara itu data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu digunakan juga data

dari hasil publikasi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang bersumber dari artikel, surat kabar, internet, dan majalah.

**TEKNIK ANALISIS**

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif ini digunakan untuk melihat dan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di Propinsi Sumatera Selatan digunakan alat analisis sebagai berikut :

***Desentralisasi Fiskal***

Konsep desentralisasi fiskal menurut Zang dan Zou (1998: 217), Mahi (2000: 58), Mursinto (2004: 170) mengenai pengukuran desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini nilai dalam satuan desimal.

$$DF_{it} = \left( \frac{PD_{it}}{TPD_{it}} \right) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

*DF<sub>it</sub>* = Derajat Desentralisasi Fiskal kabupaten/kota i, pada tahun t

*PD<sub>it</sub>* = Jumlah PAD dan DBHP/BHBP kabupaten/kota i, pada tahun t

*TPD<sub>it</sub>* = Total Pengeluaran Daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal (DF), maka menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Satuan dari variabel desentralisasi fiskal adalah desimal.

***Ketimpangan Pendapatan***

Bonet (2006: 670) melakukan studi empiris yang tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar wilayah, Bonet (2006) merumuskan cara untuk mengukur ketimpangan antar wilayah sebagai berikut:

$$I_{i,t} = \left[ \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{PROV,t}} - 1 \right] \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- $I_{i,t}$  = Ketimpangan Pendapatan  $i$  pada tahun  $t$   
 $PCGDP_{i,t}$  = PDRB per kapita Kabupaten/Kota  $i$ , pada tahun  $t$   
 $PCGDP_{Prov,t}$  = PDRB per kapita Provinsi pada tahun  $t$

Formula tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita wilayah sama dengan PDRB per kapita nasional. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relatif (daerah Kab/Kota terhadap Provinsi) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna), yang diabsolutkan.

### ***Kinerja Perekonomian Daerah***

Secara teoritis, untuk melihat perkembangan suatu daerah, diperlukan adanya perbandingan kinerja ekonomi antardaerah tersebut. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah. Untuk melihat kondisi atau dampak tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP, 2007: 7) melakukan penelitian dan salah satunya melihat dari kinerja perekonomian daerah. Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, bagaimana kondisi perekonomian antardaerah di Indonesia. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah :

- (1) Pertumbuhan PDRB Non-migas (LPE)  
Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.
- (2) PDRB per Kapita (KAP)  
Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- (3) Rasio PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Propinsi (R/N)  
Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.
- (4) Angka Kemiskinan (PM)  
Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan *head-count index*, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah tersebut, maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten  $i$  di tahun  $t$ , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$IKE_{i,t} = \frac{(LPE_{i,t} + R/N_{i,t} + KAP_{i,t} + (100 - PM_{i,t}))}{4} \dots\dots\dots (3)$$

Metode analisis ini untuk melihat konsep kinerja ekonomi antardaerah, semakin besar nilai indeks tersebut, maka semakin baik kinerja ekonomi suatu daerah.

**Konstruksi Model Ekonometrika**

Model ekonomi daerah dibangun dengan sistem persamaan regresi linier sederhana yang dikonstruksi menjadi 5 (lima) model persamaan regresi linier sederhana. (1) Model pertama menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa Pertumbuhan Ekonomi; (2) Model kedua menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa ketimpangan pendapatan per kapita; (3) Model ketiga menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa jumlah penduduk miskin; (4) Model keempat menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa indeks pembangunan manusia; (5) Model kelima menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa tenaga kerja. Adapun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

(1) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$$LPE_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 DF_{i,t} + \dots \mu_{i,t} \dots\dots\dots (4)$$

(2) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Ketimpangan Pendapatan

$$KP_{KAP_{i,t}} = \beta_0 + \beta_1 DF_{i,t} + \dots \mu_{i,t} \dots\dots\dots (5)$$

(3) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Persentase Penduduk Miskin

$$JPM_{i,t} = \delta_0 + \delta_1 DF_{i,t} + \dots \mu_{i,t} \dots\dots\dots (6)$$

(4) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM_{i,t} = \rho_0 + \rho_1 DF_{i,t} + \dots \mu_{i,t} \dots\dots\dots(7)$$

(5) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

$$PTK_{i,t} = \nu_0 + \nu_1 DF_{i,t} + \dots \mu_{i,t} \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan :

- DF* : Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota tahun t
- LPE* : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota tahun t
- KP<sub>KAP</sub>* : Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota tahun t
- JPM* : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota tahun t
- IPM* : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tahun t
- PTK* : Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tahun t
- $\alpha_0, \beta_0, \delta_0, \rho_0, \nu_0$  : Koefisien Konstanta
- $\alpha_1, \beta_1, \delta_1, \rho_1, \nu_1$  : Koefisien Parameter
- $\mu_i$  : Faktor Pengganggu Lainnya

Berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana tersebut di atas *i* menunjukkan unit *cross section* dan *t* menunjukkan periode waktu. Model ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

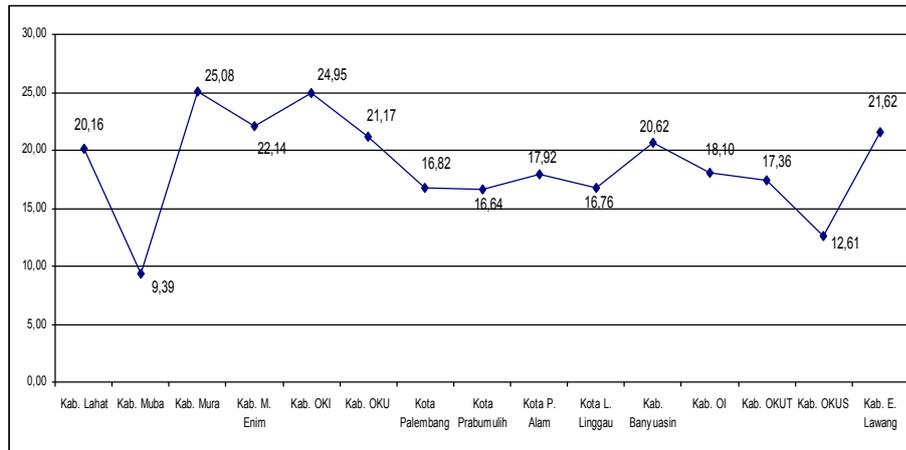
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu hasil penelitian ini adalah dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Desentralisasi Fiskal ini secara umum merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Apabila pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan indikator Perekonomian daerah mencerminkan hasil dari pencapaian perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu wilayah, seperti penambahan jumlah dan produksi barang/jasa, penambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya seperti

pengurangan ketimpangan pendapatan, pengurangan penduduk miskin, peningkatan kualitas SDM, peningkatan penyerapan tenaga kerja.

***Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal***

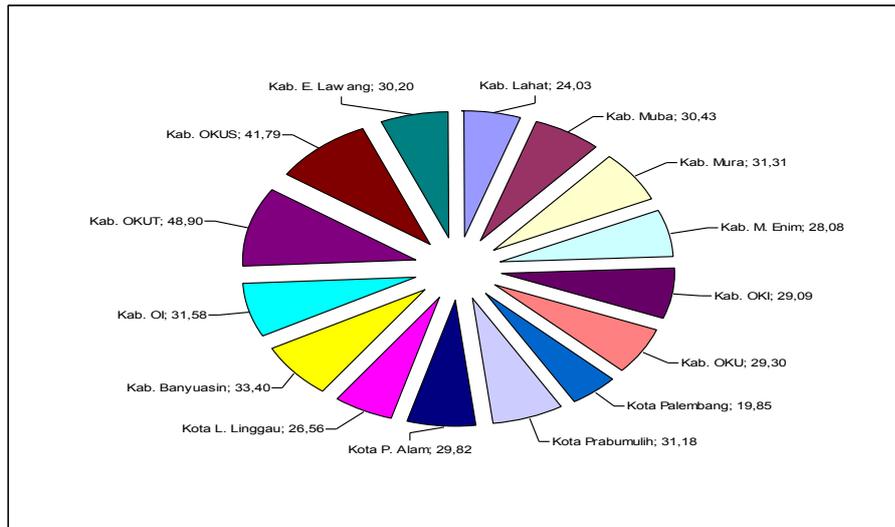
Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan penting dalam kondisi penerimaan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selama periode 2005-2009, penerimaan daerah meningkat cukup baik, rata-rata pertumbuhan 15 kabupaten/kota mencapai sebesar 18,75 persen atau berkisar antara 9,39 persen sampai dengan 25,08 persen.



Sumber : Kemenkeu, Dirjen Perimbangan Keuangan RI ([www.sikd.djpk.go.id](http://www.sikd.djpk.go.id)) (diolah)

**Gambar 2**  
**Rata-rata Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)**

Daerah yang paling tinggi rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah dari tahun 2005-2009 adalah Kabupaten Musi Rawas (25,08 persen), dan Kabupaten OKI (24,95 persen), hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan terutama DAU. sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin (9,39 persen) dan OKU Selatan (12,61 persen). Penurunan ini disebabkan oleh adanya pemekaran daerah pada tahun 2003.



Sumber : Kemenkeu, Dirjen Perimbangan Keuangan RI ([www.sikd.djpk.go.id](http://www.sikd.djpk.go.id)) (diolah)

### **Gambar 3** **Rata-rata Laju Pertumbuhan Belanja Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)**

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran atau belanja daerah, rata-rata pertumbuhan belanja daerah 15 kabupaten/kota mencapai sebesar 31,04 persen, secara umum rata-rata belanja daerah dari tahun 2005-2009 yang paling tinggi rata-rata laju pertumbuhan belanja daerah adalah Kabupaten OKU Timur yang mencapai 48,90 persen dan terendah adalah Kota Palembang sebesar 19,85 persen. Meskipun demikian, jika dilihat dari tingkat kemandirian daerah 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009, yang diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Belanja Daerah, terlihat bahwa perkembangannya masih sangat kecil. Pada tahun 2005-2009 rata-rata rasio kemandirian hanya sebesar 0,41 atau 41,00 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian fiskal daerah hanya berkontribusi terhadap belanja daerah sebesar 41,00 persen. Sedangkan jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata kontribusi tingkat kemandirian daerah terhadap belanja daerah tahun 2005-2009 yang tertinggi dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,89 atau 89 persen, kemudian yang terendah adalah Kabupaten OKI sebesar 0,24 atau 24 persen (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup tinggi, sedangkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten OKI masih sangat rendah.

**Tabel 1**  
**Rasio PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009**

Kabupaten/Kota	Tahun					Rerata
	2005	2006	2007	2008	2009	
Kab. Lahat	0,45	0,37	0,34	0,33	0,41	<b>0,38</b>
Kab. Musi Banyuasin	1,27	0,83	0,70	0,83	0,83	<b>0,89</b>
Kab. Musi Rawas	0,52	0,46	0,32	0,44	0,44	<b>0,44</b>
Kab. Muara Enim	0,53	0,52	0,42	0,43	0,46	<b>0,47</b>
Kab. Ogan Komering Ilir	0,31	0,24	0,22	0,21	0,23	<b>0,24</b>
Kab. Ogan Komering Ulu	0,53	0,37	0,33	0,33	0,37	<b>0,39</b>
Kota Palembang	0,34	0,30	0,30	0,28	0,33	<b>0,31</b>
Kota Prabumulih	0,66	0,56	0,46	0,37	0,33	<b>0,48</b>
Kota Pagar Alam	0,48	0,41	0,34	0,36	0,29	<b>0,38</b>
Kota Lubuk Linggau	0,55	0,40	0,42	0,30	0,26	<b>0,39</b>
Kab. Banyuasin	0,62	0,48	0,36	0,31	0,30	<b>0,42</b>
Kab. Ogan Ilir	0,49	0,38	0,34	0,30	0,48	<b>0,40</b>
Kab. OKU Timur	0,38	0,22	0,21	0,21	0,29	<b>0,26</b>
Kab. OKU Selatan	0,49	0,34	0,27	0,26	0,21	<b>0,31</b>
Kab. Empat Lawang	0,36	0,43	0,46	0,48	0,32	<b>0,41</b>

Sumber : Kemenkeu, Dirjen Perimbangan Keuangan RI ([www.sikd.djpk.go.id](http://www.sikd.djpk.go.id)) (diolah)

Sejalan dengan itu, untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal merupakan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Menurut Balitbang Depdagri dalam Daud (2005: 17) untuk mengetahui besarnya kemampuan keuangan daerah digunakan ukuran yang disebut Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Untuk mengukur DOF dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), kemudian akan dibandingkan dengan standar Depdagri tersebut.

**Tabel 2**  
**Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009**

Kabupaten/Kota	Tahun					Rerata
	2005	2006	2007	2008	2009	
Kab. Lahat	0,046	0,039	0,040	0,058	0,051	<b>0,047</b>
Kab. Musi Banyuasin	0,016	0,037	0,022	0,024	0,027	<b>0,025</b>
Kab. Musi Rawas	0,031	0,041	0,039	0,032	0,054	<b>0,039</b>
Kab. Muara Enim	0,074	0,068	0,068	0,066	0,058	<b>0,067</b>
Kab. Ogan Komering Ilir	0,042	0,040	0,033	0,035	0,035	<b>0,037</b>
Kab. Ogan Komering Ulu	0,050	0,042	0,045	0,056	0,064	<b>0,051</b>
Kota Palembang	0,113	0,101	0,112	0,118	0,152	<b>0,119</b>
Kota Prabumulih	0,043	0,048	0,045	0,041	0,041	<b>0,044</b>
Kota Pagar Alam	0,020	0,021	0,021	0,028	0,028	<b>0,024</b>
Kota Lubuk Linggau	0,041	0,051	0,048	0,053	0,065	<b>0,052</b>
Kab. Banyuasin	0,022	0,028	0,023	0,017	0,024	<b>0,023</b>
Kab. Ogan Ilir	0,020	0,030	0,024	0,022	0,023	<b>0,024</b>
Kab. OKU Timur	0,015	0,025	0,015	0,020	0,015	<b>0,018</b>
Kab. OKU Selatan	0,014	0,021	0,027	0,030	0,010	<b>0,020</b>
Kab. Empat Lawang	0,003	0,005	0,009	0,010	0,017	<b>0,009</b>

Sumber : Kemenkeu, Dirjen Perimbangan Keuangan RI ([www.sikd.djpk.go.id](http://www.sikd.djpk.go.id)) (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan derajat otonomi fiskal (DOF) atau kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2009. Jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat kemandirian fiskal ada satu daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tertinggi yaitu Kota Palembang sebesar 0,1192 atau 11,92 persen, sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Empat Lawang sebesar 0,008 atau 0,88 persen, pada tahun 2005 terlihat kemampuan keuangan daerah tertinggi adalah Kota Palembang sebesar 0,1126 atau 11,26 persen, sedangkan nilai terendah dimiliki Kabupaten Empat Lawang sebesar 0,034 atau 0,34 persen. kemudian pada tahun 2009 kemampuan keuangan tertinggi masih dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 0,1523 atau 15,23 persen dan yang terendah nilainya adalah Kabupaten OKU Selatan sebesar 0,0103 atau 1,03 persen. Apabila dibandingkan dengan klasifikasi DOF menurut Depdagri, maka hampir semua kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel menunjukkan kemampuan keuangan daerah masuk dalam kategori sangat kurang (0-10%), kecuali kota Palembang termasuk kategori kurang (Sukanto, 2006:25).

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata dari tahun 2005-2009 kemampuan kabupaten dan kota sebesar 0,0399 atau 3,99 persen, ada sembilan daerah yang berada di bawah nilai rata-rata yaitu Kabupaten Muba, Kabupaten Mura,

Kabupaten OKI, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang (Tabel 2).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar tingkat kemampuan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat rendah, untuk itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber penerimaan daerah agar kemampuan keuangan daerahnya meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan dan wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk Provinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Machfud (2002: 8) jika ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Demikian juga distribusi pajak Daerah antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi. Hal ini mengindikasikan juga bahwa peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

**Tabel 3**  
**Derajat Desentralisasi Fiskal menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009**

Kabupaten/Kota	Tahun					Rerata
	2005	2006	2007	2008	2009	
Kab. Lahat	0,45	0,37	0,34	0,33	0,41	<b>0,38</b>
Kab. Musi Banyuasin	1,27	0,83	0,70	0,83	0,83	<b>0,89</b>
Kab. Musi Rawas	0,52	0,46	0,32	0,44	0,44	<b>0,44</b>
Kab. Muara Enim	0,53	0,52	0,42	0,43	0,46	<b>0,47</b>
Kab. Ogan Komering Ilir	0,31	0,24	0,22	0,21	0,23	<b>0,24</b>
Kab. Ogan Komering Ulu	0,53	0,37	0,33	0,33	0,37	<b>0,39</b>
Kota Palembang	0,34	0,30	0,30	0,28	0,33	<b>0,31</b>
Kota Prabumulih	0,66	0,56	0,46	0,37	0,33	<b>0,48</b>
Kota Pagar Alam	0,48	0,41	0,34	0,36	0,29	<b>0,38</b>
Kota Lubuk Linggau	0,55	0,40	0,42	0,30	0,26	<b>0,39</b>
Kab. Banyuasin	0,62	0,48	0,36	0,31	0,30	<b>0,42</b>
Kab. Ogan Ilir	0,49	0,38	0,34	0,30	0,48	<b>0,40</b>
Kab. OKU Timur	0,38	0,22	0,21	0,21	0,29	<b>0,26</b>
Kab. OKU Selatan	0,49	0,34	0,27	0,26	0,21	<b>0,31</b>
Kab. Empat Lawang	0,36	0,43	0,46	0,48	0,32	<b>0,41</b>

Sumber : Kemenkeu, Dirjen Perimbangan Keuangan RI ([www.sikd.djpk.go.id](http://www.sikd.djpk.go.id)) (diolah)

Selanjutnya pada Tabel 3 di atas, menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang ukur dengan konsep desentralisasi fiskal menurut Zang dan Zou (1998: 217), Mahi (2000: 58), Mursinto (2004: 170) yang menggunakan pendekatan penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kondisi DDF kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009, pada tahun 2005 DDF tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 1,27 atau 127 persen atau indikator penerimaan ini sudah cukup atau melebihi dari realisasi belanja daerah total, sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu kabupaten OKI sebesar 0,31 atau 31 persen hanya mampu membiayai belanja daerahnya. Kemudian pada tahun 2009 DDF tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,83 atau 83 persen hanya mampu membiayai realisasi belanja daerah total, sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu kabupaten OKUS sebesar 0,21 atau 21 persen hanya mampu membiayai belanja daerahnya. Jika dilihat dari nilai rata-rata DDF tersebut memperlihatkan bahwa nilai tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,89 atau 89 persen, kemudian yang nilai rata-rata terendah

dimiliki oleh Kabupaten OKI sebesar 0,24 atau 24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran di kabupaten/kota di Provinsi Sumsel masih relatif rendah, kecuali Kabupaten Musi Banyuasin yang berada diatas 50 persen. Jika porsi pendapatan daerah telah melebihi 50 persen dari total pendapatan daerah, maka hakekat pelaksanaan otonomi fiskal melalui desentralisasi fiskal akan menjadi kenyataan (Susetyo, 2010: 11).

Sejalan dengan itu, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar sebagai dampak tuntutan masyarakat yang dinamis dan bergerak cepat, sementara di lain pihak dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Sekarang ini kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal.

#### ***Analisis Kinerja Perekonomian Daerah***

Kinerja perekonomian daerah merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar dengan tujuan membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penelitian ini kinerja ekonomi di ukur dengan nilai rata-rata dari peringkat Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, rasio PDRB daerah terhadap PDRB Provinsi, dan persentase jumlah penduduk miskin (Bappenas dan UNDP, 2007: 7). Hasil perhitungan tersebut memberikan gambaran kinerja perekonomian daerah mana yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 4 menunjukkan indikator perekonomian daerah yang dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kontribusi PDRB daerah terhadap Provinsi, dan persentase jumlah penduduk miskin. Dari data

tersebut menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005-2009 terlihat bahwa Kabupaten Ogan Ilir memiliki nilai tertinggi sebesar 8,09 persen, kemudian di susul oleh Kota Palembang sebesar 7,75 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terendah dimiliki oleh Kota Pagar Alam sebesar 3,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar daerah masih berusaha mengejar ketertinggalannya. Adanya peningkatan nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4**  
**Kinerja Perekonomian Daerah Kabupaten dan Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009**

Kabupaten/Kota	LPE 2005-2009	PDRB Perkapita (KAP)	Rasio PDRB Daerah Terhadap PDRB Provinsi (R/N)	Persentase Penduduk Miskin (PM)	Indeks Kinerja Ekonomi (IKE)	Peringkat
Kab. Lahat	6.36	6,681	0.042	20.98	1.670	<b>6</b>
Kab. MUBA	6.54	8,371	0.193	22.76	2.093	<b>2</b>
Kab. MURA	6.94	4,612	0.057	21.40	1.153	<b>10</b>
Kab. M. Enim	6.47	7,614	0.133	15.96	1.904	<b>4</b>
Kab. OKI	5.75	4,421	0.051	16.17	1.105	<b>12</b>
Kab. OKU	6.14	7,966	0.045	13.17	1.992	<b>3</b>
Kota Palembang	7.75	10,444	0.274	14.75	2.611	<b>1</b>
Kota Prabumulih	6.80	6,868	0.022	13.93	1.717	<b>5</b>
Kota Pagar Alam	3.77	4,962	0.010	9.66	1.241	<b>8</b>
Kota L. Linggau	6.16	5,704	0.017	15.12	1.426	<b>7</b>
Kab. Banyuasin	6.12	4,457	0.074	13.72	1.114	<b>11</b>
Kab. Ogan Ilir	8.09	4,686	0.028	15.65	1.172	<b>9</b>
Kab. OKU Timur	5.85	3,801	0.036	9.95	0.950	<b>14</b>
Kab. OKUS	6.28	3,631	0.020	12.73	0.908	<b>15</b>
Kab. E. Lawang	4.83	4,087	0.015	15.80	1.022	<b>13</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan pendapatan perkapita antar daerah, Kota Palembang masih menduduki posisi teratas, sedangkan pendapatan perkapita terendah dimiliki oleh Kabupaten OKU Selatan. Sejalan dengan itu, jika dilihat dari kontribusi PDRB daerah terhadap total PDRB Provinsi ternyata masih sangat rendah dengan rata-rata sekitar 6,8 persen. Hal ini relatif konstan selama periode 2005-2009. Ini mengisyaratkan, bahwa hampir sebagian besar daerah tersebut relatif lebih kecil peranannya dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kinerja ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering

Ulu memiliki peringkat kinerja perekonomian terbaik. Bila dicermati dua daerah yang memiliki peringkat tertinggi, sebagian besar mengandalkan sektor sekunder dan tersier. Sebagian besar peringkat sub indikator kinerja perekonomian Kota Palembang merupakan yang terbaik. Sementara itu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai peringkat terbaik dalam nilai rasio PDRB dan Pendapatan perkapita setelah Kota Palembang. Kemudian kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu terbaik didukung oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk miskin yang relatif rendah, hal ini disebabkan oleh sektor ekonominya ditopang oleh sektor pertanian, dimana harga relatif stabil.

Sementara itu daerah yang tergolong menengah atau peringkatnya berada di atas nilai rata-rata peringkat adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih, sedangkan peringkat kinerja perekonomian terendah atau di bawah nilai rata-rata ditempati Kabupaten Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan dan Empat Lawang, kemudian Kota Pagar Alam, Lubuk Linggau. Ada beberapa daerah yang merupakan hasil pemekaran tahun 2005 dan 2008, sehingga kinerja perekonomian relatif terpuruk. Banyaknya dana untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas perkantoran menyebabkan anggaran pembangunan untuk masalah ekonomi sedikit terabaikan.

Sejalan dengan uraian di atas, derajat desentralisasi fiskal daerah yang cenderung meningkat tersebut pada gilirannya berpengaruh pada kinerja perekonomian daerah. Pencapaian perekonomian daerah yang lebih baik akan mendorong investasi swasta. Faktor ini berpengaruh signifikan dalam menciptakan output, pendapatan dan kesempatan kerja, baik di daerah maju maupun daerah tertinggal. Untuk dapat meningkatkan investasi swasta di daerah, maka diperlukan stimulus fiskal berupa pengeluaran pemerintah yang memadai untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi, penyederhanaan birokrasi dalam mengurus perizinan usaha, serta insentif pajak terutama pada daerah/kabupaten yang relatif tertinggal.

Namun kebijakan desentralisasi fiskal ternyata belum efektif dalam mengurangi kesenjangan output antar daerah. Meskipun demikian, setelah tahun kedua pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, terdapat kecenderungan bahwa

kebijakan tersebut dapat menurunkan kesenjangan (Brodjonegoro, 2003: 28). Ini bisa jadi disebabkan oleh kurang tepatnya strategi yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan pembagian dana perimbangan. Dalam suatu daerah tertentu, kesenjangan tersebut dapat pula disebabkan oleh belum adanya aturan standar dalam pengalokasian pengeluaran, sehingga hanya sekitar 20 persen pengeluaran digunakan untuk pembangunan.

Perubahan kebijakan terkait dengan desentralisasi fiskal berdampak pada kinerja perekonomian daerah (produksi, penyerapan tenaga kerja) namun dampaknya beragam antardaerah. Secara umum, peningkatan penerimaan daerah berdampak positif terhadap pengeluaran daerah dan kinerja perekonomian. Peningkatan pengeluaran daerah yang bersumber dari transfer dana pusat (DAU dan atau bagi hasil) berdampak lebih besar terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran daerah yang bersumber dari peningkatan pajak atau retribusi daerah. Di sisi lain peningkatan pengeluaran investasi memiliki dampak lebih besar terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan kepada sektor-sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi (memiliki multiplier yang besar) berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian daerah.

### ***Hasil Pengujian Model***

Berdasarkan spesifikasi model regresi linier sederhana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, terlihat bahwa model dalam penelitian ini menggunakan data *cross section* (daerah) dan data *time series* (tahun). Untuk mengolah data yang demikian, maka diperlukan penggabungan data yang disebut dengan *pooling* data atau data *panel*. Pengujian Model dengan menggunakan data *panel* dengan program *E-Views*, ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian, dari ketiga pengujian tersebut menunjukkan bahwa hanya pengujian dengan *common effect* metode *Pooled Least Square* yang dapat dipakai sebagai model yang sesuai.

### ***Uji Normalitas Data***

Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan karena merupakan syarat sebelum melakukan analisis regresi, yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu data itu terdistribusi normal atau tidak. Data dapat dinyatakan terdistribusi normal bila *Asymp Sign* > *Alpha* (0,05), sebaliknya jika nilai *Asymp Sign* < *Alpha* (0,05), maka data dapat dinyatakan tidak terdistribusi normal.

**Tabel 4.22**  
**Uji Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

KETERANGAN		DDF	PE	KPP	PM	IPM	TK
N		75	75	75	75	75	75
Normal Parameters(a,b)	Mean	38.10	5.28	.913	18.84	69.61	70.15
	Std. Dev	13.889	1.758	.3130	6.816	2.343	5.648
Most Extreme Differences	Absolute	.152	.166	.201	.112	.078	.114
	Positive	.152	.166	.201	.112	.078	.059
	Negative	-.098	-.092	-.130	-.061	-.039	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.321	1.442	1.740	.973	.676	.986
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091	.073	.064	.300	.751	.285

Sumber : data diolah dengan Program SPSS 13.0

Ket : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal  
PE = Pertumbuhan Ekonomi  
KPP = Ketimpangan Pendapatan

PM = Penduduk Miskin  
IPM = Indeks Pembangunan Manusia  
TK = Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji normalitas, maka dapat dinyatakan semua data terdistribusi normal, karena seluruh Variabel penelitian memiliki *Asymp Sign* lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05. Sehingga data sampel dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi.

### ***Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi***

Berdasarkan hasil estimasi model yang telah dilakukan, untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, hasil tersebut dapat disimak pada Tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Estimasi Model Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Total panel observations 75				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	6.799018	13.65674	0.0000	* Signifikan
DDF	-3.681031	-3.284565	0.0016	* Signifikan
R-squared	0.128757	F-statistic		10.78836
Adjusted R-squared	0.116822	Prob (F-statistic)		0.001570

Ket : \* Signifikan pada level 10 % ( $\alpha = 0,10$ )

Sumber : data diolah menggunakan *Program E-Views 3.0*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel-Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,1287. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 12,87 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 87.13 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai -3,284, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih besar daripada nilai t-tabel ( $-3,284 > 1.664$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan ditolak.

Hasil estimasi terhadap model yang digunakan menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik. Hal ini terlihat setelah dilakukan uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0016 lebih kecil dari alpha 0,10, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat

desentralisasi fiskal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -3,681 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

***Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan***

Untuk melihat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk menguji hipotesis penelitian dapat disimak pada Tabel 6 sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Estimasi Model Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Total panel observations 75				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	0.626143	13.28370	0.0000	* Signifikan
DDF	0.602826	5.092292	0.0000	* Signifikan
R-squared	0.912545	F-statistic		761.7119
Adjusted R-squared	0.911347	Prob(F-statistic)		0.000000

Ket : \* Signifikan pada level 10 % ( $\alpha = 0,10$ )  
Sumber : data diolah menggunakan *Program E-Views 3.0*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.9125. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada ketimpangan pendapatan saat ini sebesar 91,25 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 8,75 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai 5,092, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih besar daripada nilai t-tabel ( $5,092 > 1.664$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis

pada penelitian ini terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan ditolak.

Hasil estimasi terhadap model yang digunakan menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik. Hal ini terlihat setelah dilakukan uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,10, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,602 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

***Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Penduduk Miskin***

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin dan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, hasil tersebut dapat disimak pada Tabel 7 sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Estimasi Model Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Total panel observations 75				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	25.54286	8.812225	0.0000	* Signifikan
DDF	-10.26715	-1.707402	0.0920	* Signifikan
R-squared	0.384012	F-statistic		2.915223
Adjusted R-squared	0.252284	Prob (F-statistic)		0.091997

Ket : \* Signifikan pada level 10 % ( $\alpha = 0,10$ )  
Sumber : data diolah menggunakan *Program E-Views 3.0*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.3840. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 38,40 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 61,60 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Setelah dilakukan estimasi model, maka pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai -1,707, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih besar daripada nilai t-tabel ( $-1,704 > 1.664$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Sumatera Selatan diterima.

Hasil estimasi terhadap model yang digunakan menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik. Hal ini terlihat setelah dilakukan uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,092 lebih kecil dari alpha 0,10, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat desentralisasi fiskal akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -10,267 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

#### ***Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia***

Kemudian untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia dan hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimak pada Tabel 8 berikut ini :

**Tabel 8**  
**Estimasi Model Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Total panel observations 75				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	64.82426	150.7918	0.0000	* Signifikan
DDF	77.20250	11.00119	0.0000	* Signifikan
R-squared	0.998208	F-statistic		406.616
Adjusted R-squared	0.998183	Prob(F-statistic)		0.00000

Ket : \* Signifikan pada level 10 % ( $\alpha = 0,10$ )

Sumber : data diolah menggunakan *Program E-Views 3.0*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel-Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,9982. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia (kesejahteraan masyarakat) saat ini sebesar 99,82 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 0,18 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai 11,001, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih besar daripada nilai t-tabel ( $11,001 > 1.664$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia (kesejahteraan masyarakat) daerah di Provinsi Sumatera Selatan diterima.

Hasil estimasi terhadap model yang digunakan menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik. Hal ini terlihat setelah dilakukan uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,10, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat

desentralisasi fiskal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (kesejahteraan masyarakat) sebesar 77,20 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia (kesejahteraan masyarakat daerah di Provinsi Sumatera Selatan).

***Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja***

Selanjutnya untuk melihat pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja dan hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimak pada Tabel 9 berikut ini :

**Tabel 9**  
**Estimasi Model Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Total panel observations 75				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	67.75550	40.18084	0.0000	* Signifikan
DDF	5.850171	1.541169	0.1276	* Tidak Signifikan
R-squared	0.031512	F-statistic		2.375203
Adjusted R-squared	0.018245	Prob(F-statistic)		0.127600

Ket : \* Signifikan pada level 10 % ( $\alpha = 0,10$ )  
Sumber : data diolah menggunakan *Program E-Views 3.0*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,0315. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada penyerapan tenaga kerja saat ini sebesar 3,15 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 96,85 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai 1,5411, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih kecil

daripada nilai t-tabel ( $1,541 < 1.664$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja daerah di Provinsi Sumatera Selatan ditolak.

Hasil estimasi terhadap model yang digunakan menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik. Hal ini terlihat setelah dilakukan uji kriteria statistik dan uji kriteria ekonometrika. Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif tapi tidak secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,1276 lebih besar dari alpha 0,10, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 5,850 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat terjawab dan disimpulkan dari beberapa masalah dalam penelitian ini mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

- (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia (kualitas manusia daerah di Provinsi Sumatera Selatan).

- (5) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- (6) Berdasarkan hasil perhitungan indeks kinerja ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan, memperlihatkan bahwa Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki peringkat kinerja perekonomian terbaik. Sementara itu daerah yang tergolong menengah atau peringkatnya menengah masih berada di atas rata-rata adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Prabumulih, sedangkan peringkat kinerja ekonomi yang peringkatnya berada dibawah rata-rata atau rendah ditempati Kabupaten Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan dan Empat Lawang.

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu:

- (1) Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui: pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan: (a) Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini bisa efektif berjalan, secara tidak langsung *growth pole* menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi; (b) Membantu pemasaran produk usaha rakyat maupun produk pertanian, antara lain melalui penyediaan fasilitas tempat pemasaran, informasi dan telekomunikasi pemasaran usaha rakyat di masing-masing daerah; (c) Bantuan modal meliputi: kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir bagi usaha rakyat yang tepat sasaran berujud natura seperti sapi, kambing dan sebagainya yang bisa mengakselerasi ekonomi; (d) Pemerintah daerah memfasilitasi program *linkage* maupun program kemitraan dengan konsep "*win-win solution*" antara usaha rakyat dengan industri besar, baik di bidang bahan baku maupun output sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah.
- (3) Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (*human development*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui: (a) Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum

yang ada dengan menambah alokasi anggaran (20 persen dari APBD); (b) Di bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat berperilaku sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (c) Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, BBM, dan sebagainya.

Penelitian lebih lanjut terkait dengan tema ini, diharapkan dapat memperluas skope/daerah penelitian serta periode waktu yang lebih lama, serta teori-teori yang lebih baru, sehingga akan memperdalam kajian analisis dan ketajaman implikasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW* (Terakreditasi).
- Azwardi. 2007. The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance In Indonesia. *Parallel Session IA : Fiscal Decentralization*. 12 Desember 2007. *IRSA* Kampus Universitas Indonesia.
- Azwardi. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Antardaerah di Indonesia. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Tidak dipublikasikan).
- Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Selatan dalam angka, Berbagai edisi. Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. *Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP, 2007. Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. ISBN: 978-979-17554-1-2. Penerbit BRIDGE (*Building and Reinventing Decentralized Governance*). Jakarta.
- Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From the Colombian experience. *Original Version*. *JEL Classification* H77 - O18 - R11 - R58.
- Brodjonegoro, Bambang P.S, 2001. "The impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Econometrics Approach." Vanersborg, Sweden: *Udavella Symposium 2001: Regional Economies in Transitions*, June 14-16.
- Carlos Gil Canaleta, Pedro Pascual Arzoz, Manuel Rapun Garate and Roberto Ezcurra Orayen. 1996. *Decentralisation And Regional Economic Disparities*. Departament of Economics, Campus de Arrosadia. Universidad Pública de Navarra
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994, *Dasar Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

- Ebel, Robert D and Seidar Yilmaz. 2002. On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. *World Bank Institute*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- Ebel, Robert D and Seidar Yilmaz. 2002. Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. *World Bank Institute*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
- Ehtisham, Ahmad; Ma, Jun; Searle, Bob; Piperno, Stefano, 2002. "Intergovernmental Grant System: Application of General Framework to Indonesia". *IMF Working Paper No. WP/02/128*. International Monetary Fund, Washington DC.
- Gujarati, Damodar. 1988. *Basic Econometric*. 2<sup>nd</sup> ed., McGraw Hill international Editions, New York
- Hasibuan, Nurimasyah. 2000. Kemiskinan Struktural di Indonesia : Menembus Lapisan Bawah. *Jurnal Studi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka. [www.google.com](http://www.google.com)
- Jin, Jing and Heng-Fu Zou. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. World Bank. *Working Paper Series* 1452. <http://www.worldbank.org>
- Mahi, Raksaka, 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Penelitian CSIS XXIX*, , Indonesia Project, Jakarta. Hal. 54-66.
- Machfud Sidik. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. *Makalah Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia"*. Yogyakarta.
- Mursinto, Djoko, 2004, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. hal. 57 Yogyakarta.
- Rao, M.G. 2000. Poverty Alleviation under Decentralization. *World Bank Institute*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- Sayogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Penerbit Yayasan Agro Ekonomika, Yogyakarta.
- Sukanto, 2007. Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Tesis Program Pascasarjana Unsri* (tidak dipublikasikan)
- Susetyo, Didik. 2010. Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional. *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, Robert A. 2002. *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Dalam Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Slinko, Irina. 2002. Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions. Available: <http://www.econpapers.repec.org>
- Thresch, Richard W. 2002. *Public Finance: A Normative Theory*. California: Academic Press.
- Vasquez, Jorge Martinez dan Robert M Mc. Nab. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. *Working Papers*, Andrew Young School of Policy Studies. Available: <http://www.ecopapers.repec.org>
- Zhang T. and Zou Heng-Fu, 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics* Vol. 67, 221-240.